2022

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER

KATA PENGANTAR

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2016-2021 dan Tahun 2022-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2022 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja lima tahun ke depan serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2022 dan Rancangan APBD Kabupaten Paser Tahun 2022.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SUmber Daya Manusia tahun 2022 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini kami ucapkan terima kasih, namun demikian tetap diharapkan koreksi dari semua pihka guna kesempurnaan pada masa yang akan datang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tana Paser, 30 Juni 2021

Kepala Badan,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23
2.4 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Paser .. 38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 35

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN PROGRAM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31
3.3. Program dan Kegiatan..... 41

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung guna Pencapaian Sasaran	8
Tabel 2.2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Paser	10
Tabel 2.2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.....	20
Tabel 2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser	26
Tabel 3.1.	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	37
Tabel 3.3.	Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	46

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di linkgup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, serta melalui proses mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan forum Perangkat Daerah Kabupaten Paser. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota.

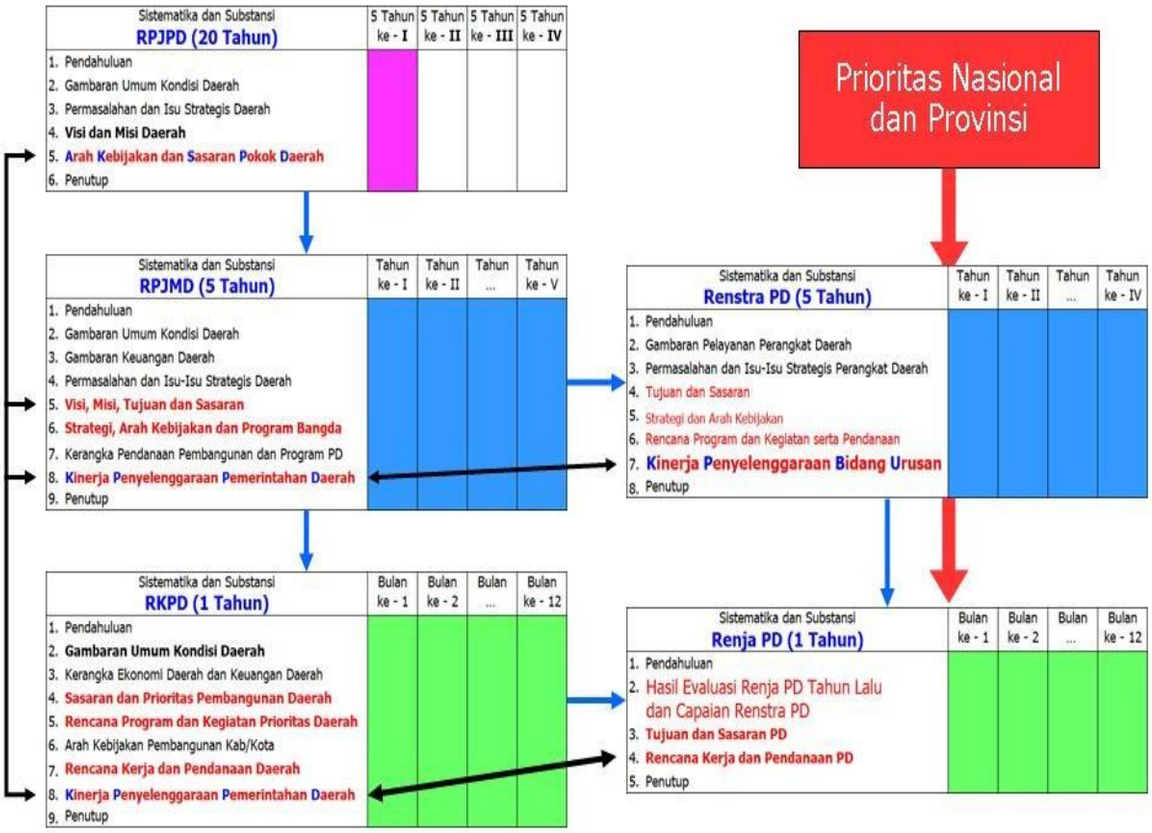

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022-2026.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah :

1. Menjabarkan arahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2022-2026 ke dalam Rencana Kerja yang dilaksanakan pada tahun 2022;
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Paser dengan perencanaan Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja dan Rencana Kerja

BKPSDM Kabupaten Paser tahun 2022 ini merupakan finalisasi Rencana Kerja Pemerintan Kabupaten Paser;

3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA Perangkat Daerah Tahun 2022 dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terkandung dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (2019) dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menggambarkan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang berisikan tentang penelaahan yang menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bab ini menjelaskan korelasi antara rencana kerja yang sudah dirumuskan oleh dinas dan sumber pendanaan beserta alokasi dana yang akan disediakan untuk dinas

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPTEN PASER TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 10.724.646.867,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 6.285.647.044,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 4.439.000.000,- sedangkan realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 adalah Rp. 4.857.100.865,- dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 adalah Rp. 3.854.255.624,-, sehingga total realisasi tahun 2020 adalah Rp. 8.711.356.489,- atau sebesar 81.23%.

Tabel 2.1.
Alokasi dan Realiasai Anggaran Belanja Langsung Guna Pencapaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	554.321.000,-	6.974.205.708,-	99.33
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3.552.818.740,-	2.588.768.459,-	72.87
		Persentase jumlah PNS/Aparatur sesuai kebutuhan	8.446.511.880,-	6.423.575.331,-	76.05
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masayarakat	2.242.370.976,-	1.915.320.436,-	85.41
3.	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase record data yang di update	138.345.050,-	133.879.600,-	96.77
		Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawaian	160.400.500,-	53.307.050,-	33.23
	Jumlah		18.098.055.584,-	15.094.768.146	83.41

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari sasaran di atas telah terealisasi Rp. 15.094.768.146,- atau sebesar 83.41%.

Pada umumnya program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2019 dan telah terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 dapat dilaksanakan dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, bahkan terdapat realisasi target kinerja yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula kegiatan yang tidak memenuhi target. Berikut diuraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser dan Capaian Renstra SKPD pada Tahun 2019. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu (2020) berdasarkan Indikator Kinerja program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Paser

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**										
05	**06**			**Badan Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**										
1	**1**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Outcome : Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah berjalan baik 2. Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran**	**100**	**%**		**100**	**54**	**54**	**100**	**100**	**100**
1	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Jumlah berkas surat menyurat dikirim	60	bulan	18	12	0	0	12	12	100
1	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	21	12	12	100	12	12	100
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output :Terbayarnya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	15	unit	6	2	2	100	2	2	100
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan	540	OB	216	108	72	67	72	72	100
1	1	1	2	Penyediaan alat tulis kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	24	12	12	100	12	12	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	60	bulan	18	12	12	100	12	12	100
1	1	1	2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	33	12	12	100	12	12	100
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	125	unit	47	19	19	100	23	23	100
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60	bulan	36	12	12	100	12	12	100
1	1	1	2	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat	2950	kotak	1690	350	340	97	400	400	100
1	1	1	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Output : Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi	60	bulan	36	12	12	100	12	12	100
1	1	1	2	Penataan Arsip SKPD	Output :Tersusunnya arsip BKPP dengan baik	60	bulan	36	12	12	100	12	12	100
1	**1**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Outcome : Persentase PD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur**	**100**	**%**		**100**	**57**		**100**		
1	1	2	1	Pengadaan mebeleur	Output : Tersedianya Mebeleur	40	unit	14	10	10	100	6	6	100
1	1	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Terpeliharanya gedung kantor	60	bulan	36	12	12	100	12	12	100
1	1	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Output : Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan	25	kali	9	1	5	500	1	1	100
1	1	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	42	kali	30	2	5	250	1	1	100

1	1	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60	unit	33	12	12	100	12	12	100
1	1	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	unit	36	12	12	100	12	12	100
1	**1**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Outcome : Persentase penetapan pejabat struktural berdasarkan hasil seleksi jabatan/assessment**	**100**	**%**		**100**	**66**		**100**		
1	1	3	1	Pengambilan sumpah & pelantikan pejabat struktural	Output : Jumlah Pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat struktural	25	kali	17	11	4	36	11	11	100
1	1	3	2	Pengambilan sumpah janji PNS	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti sumpah janji PNS	510	orang	346	150	150	100	250	250	100
1	**1**	**3**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Outcome : Persentase PNS yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan (Prajab/Pim/TF)**	**100**	**%**		**100**	**74**		**100**	**100**	**100**
1	1	3	1	Pembekalan Bagi PNS Yang Akan Memasuki Purna Tugas	Output : Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pembekalan	25	kali	47	150	47	31.33333333	174	174	100
1	1	3	2	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS	Output : Meningkatnya pemahaman PNS Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang tugas masing masing	510	orang	157	70	70	100	73	73	100
				Pelaksanaan Ujian Dinas	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas	20	orang	37	0	0	0	80	80	100
1	**1**	**3**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Outcome : Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	1	3	1	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Output : Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun	50	buku	20	10	10	100	10	10	10
1	**1**	**3**		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Outcome : Persentase PD yang mempunyai data SIPD secara lengkap**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

1	1	3	1	Penyusunan data Statistik Sektoral	Output : Jumlah Dokumen data statistik sektoral SKPD yang tersusun	40	buku	20	10	10	100	10	10	10
1	**1**	**3**		**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Outcome : Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan BKPSDM Kabupaten Paser	Output: Jumlah Buku/Laporan Perencanaan yang tersusun	85	Dokumen	28	0	0	0	10	10	10
1	1	3	1	Penyusunan RENJA SKPD	Output : Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD yang tersusun	50	buku	30	10	10	100	10	10	10
1	1	3	2	Evaluasi RENJA SKPD	Output : Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	20	triwulan	12	4	4	4	4	4	4
				Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur	**Outcome : Persentase penetapan pejabat struktural berdasarkan hasil seleksi jabatan/assessment**	**100**	**%**	**100**	**100**	**126**	**205**	**100**	**100**	**100**
				Pembinaan jabatan dan kepangkatan oleh Tim Baperjakat	Output : Jumlah penyelenggaran mutasi dan promosi sesuai kebutuhan	20	kali	20	2	6	300	6	6	100
				Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS Daerah	Output : Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS Daerah	250	PNS	320	45	97	216	108	108	100
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Output : Terselenggaranya diklat dasar bagi CPNS Formasi Kementan dan Kemenkes	140	orang	-	166	166	100	140	140	100
1	**1**	**3**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Outcome : Cakupan pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu (persen)**	**100**	**%**	**100**	**100**	**104**	**80**	**100**	**100**	**80**
1	1	3	2	Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Output : Terpenuhinya Aparatur Pemerintah sesuai kebutuhan	135	orang	62	14	15	107	14	14	100

1	1	3	1	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Output : Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan	60	orang	210	500	0	0	500	500	100
1	1	3	2	Penetapan sistem satu atap kenaikan pangkat	Output : Jumlah Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS yang tepat waktu	3000	orang	2.692	1000	1014	101	1000	1000	100
1	1	3	2	Pengelolaan dan pemanfataan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)	Output : Jumlah dokumen tentang data kepegawaian yang tersedia	10	dok	6	2	2	100	2	2	100
1	1	3	1	Penyelesaian SK Pensiun/Nota usul persetujuan BKN	Output : Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS yang tepat waktu	442	SK	379	130	122	94	160	160	100
1	1	3	2	Penyelesaian administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS	Output : Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	224	PNS	253	166	166	100	140	140	100
1	1	3	2	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	Output : Dokumen LHKPN yang disampaikan ke KPK	1185	dok	604	231	231	100	229	229	100
1	1	3	1	Pengelolaan tatanaskah/Roll O Pack PNS	Output : Tersedianya data fisik tatanaskah kepegawaian dan file elektronik (image document)	4250	Tata naskah	4033	850	870	102	1000	1000	100
1	1	3	2	Pengelolaan,pemanfaatan dan pemeliharaan SAPK	Output : Jumlah dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang tersedia	5	dokumen	3	1	1	100	1	1	100
1	1	3	2	Penyelesaian Penerbitan SK jabatan Fungsional	Output : Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional yang tepat waktu	766	orang	582	150	124	83	500	500	100
1	1	3	1	Pembuatan Kartu Identitas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	Output : Jumlah kartu tanda pengenal PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang terbit	2730	Kartu	1937	800	800	100	800	800	100
1	1	3	2	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Output :Jumlah Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan	30	kasus	34	12	14	117	10	10	100
1	1	3	2	Penataan administrasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat	Output : Jumlah PNS yang mengikuti Rapat Evaluasi Kenaikan Pangkat	5100	orang	1853	120	137	114	120	120	100
1	1	3	1	Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS	Output : Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1	Aplikasi	3	1	1	100	1	1	100
1	1	3	2	Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS	Output : Jumlah SK peninjauan/SK perbaikan	35	SK	39	12	13	108	12	12	100

1	1	3	2	Lelang Jabatan ASN	Output : Jumlah SK peninjauan/SK perbaikan	19	Jabatan	60	4	4	100	5	5	100
1	1	3	1	Assessment PNS	Output : Jumlah PNS yang mengikuti Assesment	478	orang	79	20	32	160	28	28	100
1	1	3	2	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Memenuhi Masa Kerja yang Telah Ditentukan	Output : Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan SLKS	2000	orang	1.343	500	444	89	600	600	100
1	1	3	2	Fasilitasi Pengelolaan Assesment Center	Output : Tersedia dan terselenggaranya pengelolaan, Pengembangan dan fasilitasi layanan teknologi informasi Assessment Center BKPP Kab. Paser	48	bulan	15	12	12	100	12	12	100
1	1	3	1	Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian	Output : Jumlah kartu identitas kepegawaian yang terbit (Taspen, Karpeg, KAris, Karsu, KPE dan Konversi NIP)	825	kartu	547	42	63	150	42	42	100
1	1	3	2	Pelaksanaan Administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN	Output : Jumlah rekomendasi dan SK dari BKPP Paser, BKD Provinsi dan BKN	42	orang	42	35	27	77	35	35	100
1	1	3	1	Penilaian Kinerja PNS	Output : Jumlah SKP Yang terkumpul yang dievaluasi	4831	skp	4.831	4831	4831	100	4630	4630	100
1	1	3	2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	Output : Jumlah dokumen laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin ASN	4831	dokumen	4.831	4831	4831	100	12	12	100
1	1	3	2	Rekonsilisasi Data Kepegawaian	Output : Cakupan Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu (persen)	300	%	100%	100	100	100	100	100	100
				Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI										
1	1	3	3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Output : Fasilitasi Kegiatan Rakerda dan Apel KORPRI gabungan	0	0	0	14	0	0	14	0	0

1	1	3		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Output : Failitasi Kegiatan kompetensi olahraga KORPRI	0	0	0	1	0	0	1	0	0
				Penyelenggaraan MTQ KORPRI	Output : Fasilitasi Kegiatan MTQ KORPRI	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

   Indikator kinerja :

   Cakupan pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu (81.54%)

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Aparatur

   Indikator Kinerja :

   Persentase penetapan pejabat struktural berdasarkan hasil seleksi jabatan/assesment (0%)

   Cakupan Jabatan Struktural yang diisi berdasarkan seleksi terbuka (0%)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

   Indikator Kinerja :

   Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional (69.10%)

   Jumlah tenaga pengawas yang bersertifikat (65%)

   Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar (12.90%).

Berdasarkan tabel capaian kinerja indikator program prioritas RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021 untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2020. Terdapat 2(dua) indikator kinerja program yang capaiannya 0%, hal tersbeut disebabkan seleksi terbuka yang diselenggarakan guna mengisi 4 (empat) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) belum dapat ditetapkan karena saat tersebut Kabupaten Paser memasuki tahap pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) mengatur secara jelas adanya larangan bagi pejabat untuk melakukan mutasi jabatan dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan dan enam bulan setelah penatapan calon pasangan Kepala Daerah.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, dari enam indikator kinerja sasaran tersebut hanya satu indikator yang nilai efisiensi positif yakni Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawaiannya, hal tersebut mengindikasikan adanya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Hambatan dan Strategi Pemecahan Masalah

Beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanana pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :

1. Masih rendahnya angka indeks kompetensi Aparatur Sipil Negara
2. Masih belum terintegrasinya aplikasi pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
3. Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Sarana dan Prasarana pelayanan administrasi kepegawaian belum refresentatif
5. Kebijakan BKN dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Beberapa Strategis pemecahan masalah yang akan dan telah dilakukan

1. Melakukan perubahan anggaran dalam rangka efisiensi anggaran kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan yang belum teralokasikan dapat segera dilaksanakan
2. Membuat telaahan staf dukungan pembangunan gedung Assesment Center guna peningkatan layanan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Melakukan koordinasi intensif dengan Instansi terkait guna kepastian pemenuhan gedung Assesment Center
4. Melakukan pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Melakukan pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN berdasarkan hasil analisis GAP kompetensi

6. Membuat inovasi layanan yang terintegrasi dan mengoptimalkan pelayanan berbasis web guna meningkatkan transfaransi layanan kepagawaian.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Paser kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dan Aparatur sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Paser kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser disajikan pada Tabel berikut. Termasuk dalam analisis tersbeut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel 2.2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser

No.	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Jumlah penerbitan SK pensiun PNS yang diterbitkan			82	120	130	160	160	143	122	100	150	
2	Jumlah Aparatur yang mengikuti sumpah janji PNS			0	310	130	73	140	216	130	135	70	
3	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS			28	28	166	160	140	43	166	92	150	
4	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan			0	0	150	150	61	0	47	80	150	
5	Jumlah CPNS yang lulus mengikuti diklat dasar			28	28	167	140	140	43	167	0	140	
6	Terfasilitasinya kegiatan KORPRI			0	0	0	0	4	0	0	0	0	
	Jumlah dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang tersedia (SAPK)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah tata naskah kepegawaian yang tersusun			2	2	2	2	2	1	1	1	2	
	Jumlah Kartu Identitas Pegawai yang diterbitkan			850	4.930	870	1.000	800	1.500	870	1.004	750	
	JUmlah rekomendasi SK dari BKPSDM yang diterbitkan			0	35	35	35	35	15	27	17	15	

	Jumlah SK Kenaikan pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu			500	900	120	0	1.000	702	1014	137	950	
	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi Calon JPT			150	4	4	5	6	9	4	5	6	
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi			113	96	115	181	167	85	225	167	100	
	Jumlah ASN yang mendapatkan ijin belajar dan tugas belajar			25	25	14	11	15	22	26	14	4	
	Jumlah Sk Jabatan Fungsional yang diterbitkan			250	50	150	500	150	208	251	123	341	
	Jumlah dokumen LHKPN yang disampaikan ke KPK			30	198	231	204	204	175	198	229	230	
	JUmlah SKP yang terkumpul dan dievaluasi			0	0	4931	4691	4697	0	0	4831	4691	
	Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan SLKS			400	100	500	600	600	451	448	444	554	
	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan			3	4	12	10	7	9	11	14	7	
	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun			14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	Jumlah dokumen RKA yang tersusun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah dokumen RKA perubahan yang tersusun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersusun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersusun			4	4	4	4	4	4	4	4	4	

	Jumlah sosialisasi perundang-undangan yang terlaksanakan			0	0	0	0	4	0	0	0	4	
	Jumlah jasa listrik, air dan telpon yang terbayarkan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah komponen listrik			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah alat tulis kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah cetak dan penggandaan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan			25	16	19	23	3	25	3	19	1	
	JUmlah jasa perizinan kendaraan yang terbayarkan			3	3	3	3	5	3	3	3	3	
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	12	12	12	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan;
3. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
4. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan sistem reward and punishment yang lebih tegas belumterlaksana secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah;
5. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer dan melalui proses seleksi penerimaan dan penempatannya belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
6. Belum optimalnya pemanfaatandan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem layanan informasi manajemen kepegawaian;
7. Belum tegasnya dalam menempatkan pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensi;
8. Kebijakan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar lebih disiplin dan profesional. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah pelayanan publik bidang kepegawaian yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean*

governance) melalui penataan pegawai yang profesional dan proforsional, dengan dukungan sarana prasarana yang memadai di daerah. Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Tahun 2022 49 pensiun pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan tidak mengurangi pelayanan dibidang kepegawaian di daerah, sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang ada di daerah dan terus dilakukan pembinaan pengawasan agar Pegawai Negeri Sipil di daerah mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik dibidang kepegawaian,oleh karena itu isu-isu penting diatas yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan adalah :

1. Perubahan peraturan dibidang pemerintahan daerah berdampak pada tuntutan perbaikan kinerja pegawai di bidang pelayanan kepegawaian yang membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja setiap unit kerja;
2. Komposisi pegawai yang ada harus sesuai dengan kebutuhan terutama dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi;
3. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat, tepat dan transparan sebagai perwujudan good governance;
4. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur yang terstruktur agar PNS lebih disiplin dan professional;
5. Terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

6. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi yang berbasis data elektronik melalui jaringan internet dalam menunjang pelayanan kepegawaian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Awal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 berpedoman pada Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis tahun 2021-2026. Pada ranwal RKPD penyusunan Program Kegiatan sebagaimana tergambar dalam rancangan awal rencana kerja anggaran Tahun 2022 masih dilakukan dengan menggunakan numenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 69 tanggal 23 Juli 2020 tentang RKPD Tahun 2021 dengan hasil kebutuhan terhadap program dan kegiatan wajib maupun teknis, yang meliputi indikator kinerja, target capaian dan pagu anggaran/kebutuhan dana yang ditetapkan.

Tabel 2.4 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan aal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dna kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Tahun 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capai an		Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEPEGAWAIAN					**12.140.695.281,-**						**19.733.469.312,-**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya sumber daya penunjang pelaksanaan program dan kegiatan**			**6.141.154.041,-**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya sumber daya penunjang pelaksanaan program dan kegiatan**			**6.141.154.041,-**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**209.135.791,-**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**209.135.790-**	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tnh Grt	Jumlah dokumen perancanaan daerah (Rensra, Renja, Ranwal PD) yang tersusun	6	Dok	75.010.400,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tnh Grt	Jumlah dokumen perancanaan daerah (Rensra, Renja, Ranwal PD) yang tersusun	6	Dok	75.010.400,-	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Rencana Aksi, IKU dan IKI, TEPRA, SIRUP, LPPD, Ev.Renstra, Ev. RPJMD) yang tersusun	10	dok	134.125.391,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Rencana Aksi, IKU dan IKI, TEPRA, SIRUP, LPPD, Ev.Renstra, Ev. RPJMD) yang tersusun	10	dok	134.125.390,-	

4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**5.399.656.210,-**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**5.399.656.210,-**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tnh Grgt	Daftar gaji dan tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tnh Grgt	Daftar gaji dan tunjangan ASN				
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Tnh Grgt	Jumlah dokumen keuangan PD yang tersusun (Lap. Rekosiliasi keuangan, prognosis, CaLK) Jumlah dokumen keuangan PD yang tersusun (SPP-SPM)	15 250	Dok Dok	208.699.080,-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Tnh Grgt	Jumlah dokumen keuangan PD yang tersusun (Lap. Rekosiliasi keuangan, prognosis, CaLK) Jumlah dokumen keuangan PD yang tersusun (SPP-SPM)	15 250	Dok Dok	208.699.080,-	
6	**Administrasi Kepegawaian PD**					**50.000.700,-**	**Administrasi Kepegawaian PD**					**50.000.700,-**	
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tnh Grgt	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	47	org PD	50.000.700,-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tnh Grgt	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	47	org PD	50.000.700,-	
8	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**295.585.550,-**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**295.585.550,-**	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tnh Grgt	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	12	bln	1.452.440,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tnh Grgt	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	12	bln	1.452.440,-	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tnh grgt	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebtuuhan	2	unit	16.984.000,-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tnh grgt	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebtuuhan	2	unit	16.984.000,-	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tnh grgt	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12	bln	40.001.610,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tnh grgt	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12	bln	40.001.610,-	
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tnh Grgt	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12	bhn	10.011.100,-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tnh Grgt	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12	bhn	10.011.100,-	

13	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tnh Grgt	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	720	eks	4.593.600,-	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tnh Grgt	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	720	eks	4.593.600,-	
2	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tnh Grgt	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	bln	155.030.800,-	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tnh Grgt	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	bln	155.030.800,-	
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tnh Grgt	Jumlah jenis arsip dinamis yang terkelola secara efektif dan efisien	11	jns	67.512.000,-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tnh Grgt	Jumlah jenis arsip dinamis yang terkelola secara efektif dan efisien	11	jns	67.512.000,-	
15	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**60.033.300,-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**60.033.300,-**	
16	Pengadaan Meubel	Tnh Grgt	Jumlah meubelair yang diadakan			8.838.500,-	Pengadaan Meubel	Tnh Grgt	Jumlah meubelair yang diadakan			8.838.500,-	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tnh Grgt	Tersedianyan peralatan dan peralatan mesin kantor lainnya sesuai kebutuhan	3	unit	51.194.800,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tnh Grgt	Tersedianyan peralatan dan peralatan mesin kantor lainnya sesuai kebutuhan	3	unit	51.194.800,-	
18	**Penyediaan Jasa Pneunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1.545.500,-**	**Penyediaan Jasa Pneunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1.545.500,-**	
19	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tnh Grgt	Jumlah jasa surat menyurat yang dikirim	10	dok	456.500,-	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tnh Grgt	Jumlah jasa surat menyurat yang dikirim	10	dok	456.500,-	
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik	Tnh Grgt	Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKPSDM yang terbayarkan	12	bln	1.089.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik	Tnh Grgt	Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKPSDM yang terbayarkan	12	bln	1.089.000,-	
20	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pneunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**125.196.990,-**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pneunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**125.196.990,-**	

21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tnh Grgt	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dna terbayarnya pajak kendaraan	2	unit	44.491.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tnh Grgt	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dna terbayarnya pajak kendaraan	2	unit	44.491.000,-	
4	Pemeliharaan Peraltan dan Meisn lainnya	Tnh Grgt	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	17.572.000,-	Pemeliharaan Peraltan dan Meisn lainnya	Tnh Grgt	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	17.572.000,-	
22	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tnh Grgt	Terpeliharanya gedung kantor	12	bln	58.863.990,-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tnh Grgt	Terpeliharanya gedung kantor	12	bln	58.863.990,-	
5	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tnh Grgt	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	unit	4.270.000,-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tnh Grgt	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	unit	4.270.000,-	
23	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**5.999.541.240**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**5.999.541.240**	
6	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**					**1.481.375.790,-**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**					**1.481.375.790,-**	
24	Kooridnasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tnh Grgt	Jumlah administrasi pengangkatan CNS danPPPK yang terselesaikan Jumlah CPNS yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS Jumlah peserta yabg lulus seleksi CPNS dan PPPK	304 154 154 150	org	617.579.530,-	Kooridnasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tnh Grgt	Jumlah administrasi pengangkatan CNS danPPPK yang terselesaikan Jumlah CPNS yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS Jumlah peserta yabg lulus seleksi CPNS dan PPPK	304 154 154 150	org	617.579.530,-	
25	Koordinasi pelaksanaan	Tnh Grgt	Jumlah SK pension yang diterbitkan tepat waktu	160	SK	69.020.000,-	Koordinasi pelaksanaan	Tnh Grgt	Jumlah SK pension yang diterbitkan tepat waktu	160	SK	69.020.000,-	

	administrasi pemberhentian						administrasi pemberhentian						
26	Evaluasi Pemberhentian ASN	Tnh Grgt	Jumlah ASN yang mengikuti pembekalan	53	org	84.292.730,-	Evaluasi Pemberhentian ASN	Tnh Grgt	Jumlah ASN yang mengikuti pembekalan	53	org	84.292.730,-	
27	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Tnh Grgt	Jumlah fasilitasi kegiatan KORPRI yang dapat terlaksana	4	keg	161.343.670,-	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Tnh Grgt	Jumlah fasilitasi kegiatan KORPRI yang dapat terlaksana	4	keg	161.343.670,-	
7	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tnh Grgt	Aplikasi kepegawaian yang ditingkatkan, dikelola dan dipelihara	1	aplks	221.936.000,-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tnh Grgt	Aplikasi kepegawaian yang ditingkatkan, dikelola dan dipelihara	1	aplks	221.936.000,-	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tnh Grgt	Jumlah KARPEG/KARIS?KARSU?TASPEN yang telah diterbitkan Jumlah Kartu Tanda Penganl ASN yang diterbitkan Persentase data kepegawaian yang diperbaharui	100 800 100	Dok Kartu %	252.163.660,-	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tnh Grgt	Jumlah KARPEG/KARIS?KARSU?TASPEN yang telah diterbitkan Jumlah Kartu Tanda Penganl ASN yang diterbitkan Persentase data kepegawaian yang diperbaharui	100 800 100	Dok Kartu %	252.163.660,-	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tnh Grgt	Persnetase rekonsiliasi Data Kepegawaian di lingk.Pemkab Paser	100	%	75.040.200,-	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tnh Grgt	Persnetase rekonsiliasi Data Kepegawaian di lingk.Pemkab Paser	100	%	75.040.200,-	
28	**Mutasi dan Promosi ASN**					**1.124.931.550,-**	**Mutasi dan Promosi ASN**					**1.224.931.550,-**	
29	Pengelolaan Mutasi ASN	Tnh Grgt	Jumlah rekomendasi dan SK dari BKPSDM Paser, BKD Provinsi, BKN dan Mendagri	400	dok	130.754.750,-	Pengelolaan Mutasi ASN	Tnh Grgt	Jumlah rekomendasi dan SK dari BKPSDM Paser, BKD Provinsi, BKN dan Mendagri	400	dok	130.754.750,-	
30	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Tnh Grgt	Jumlah SK Kenaikan Oangkat yang dievaluasi Jumlah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang	1 800	Dok SK	163.574.000,-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Tnh Grgt	Jumlah SK Kenaikan Oangkat yang dievaluasi Jumlah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat	1 800	Dok SK	163.574.000,-	

			diterbitkan tepat waktu						yang diterbitkan tepat waktu				
31	Pengelolaan Promosi ASN	Tnh Grgt	Terseleksinya jumlah ASN yang dapat mengikuti seleksi calon JPT Terseleksinya jumlah ASN yang mnegikuti lelang jabatan Terselenggaranya rapat baperjakat	24 24 6	Org Org rapat	830.602.800,-	Pengelolaan Promosi ASN	Tnh Grgt	Terseleksinya jumlah ASN yang dapat mengikuti seleksi calon JPT Terseleksinya jumlah ASN yang mnegikuti lelang jabatan Terselenggaranya rapat baperjakat	24 24 6	Org Org rapat	930.602.800,-	
32	**Pengembangan Kompetensi ASN**					**2.595.161.400,-**	**Pengembangan Kompetensi ASN**					**2.495.161.400,-**	
8	Pengelolaan Assesment Center	Tnh Grgt	Meningkatnya mutu SDM Tim teknis IT As. Center Terkelolanya sarana dan prasarana As.center	5 12	Org bln	926.164.000,-	Pengelolaan Assesment Center	Tnh Grgt	Meningkatnya mutu SDM Tim teknis IT As. Center Terkelolanya sarana dan prasarana As.center	5 12	Org bln	726.164.000,-	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	Tnh Grgt	Jumlah pegawai dapat difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan diklat Jumlah pegawai yang difasilitasi mendapatkan Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Jumlah pegawai yang difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Dinas Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk	40 33 171 100 0	Orang Org org	975.339.800,-	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	Tnh Grgt	Jumlah pegawai dapat difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan diklat Jumlah pegawai yang difasilitasi mendapatkan Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Jumlah pegawai yang difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Dinas Jumlah pegawai yang dapat	40 33 171 100 0	Orang Org org	1.075.339.800,-	

			mendapatkan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan workshop/sosialisasi/ pelatihan						difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan workshop/sosialisasi/pelatihan				
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tnh Grgt	Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar atau Ijin belajar	10	org	515.812.200,-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tnh Grgt	Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar atau Ijin belajar	10	org	515.812.200,-	
33	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tnh Grgt	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan tepat waktu	120	SK	114.424.000,-	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tnh Grgt	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan tepat waktu	120	SK	114.424.000,-	
34	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Tnh Grgt	Jumlah rekomendasi peninjauan masa kerja	10	SK	63.421.000,-	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Tnh Grgt	Jumlah rekomendasi peninjauan masa kerja	10	SK	63.421.000,-	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					**798.072.500,-**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**					**798.072.500,-**	
36	Penyusunan Kebijajan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tnh Grgt	Jumlah Peraturan Bupati dna Petunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN	2	dok	72.056.000,-	Penyusunan Kebijajan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tnh Grgt	Jumlah Peraturan Bupati dna Petunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN	2	dok	72.056.000,-	
37	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tnh Grgt	JUmlah Perbup danPetunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN Jumlah SKP yang terkumpul dan di evaluasi	2 4.634 224	Dok SKP Wajib lapor	267.993.500,-	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tnh Grgt	JUmlah Perbup danPetunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN	2 4.634 224	Dok SKP Wajib lapor	267.993.500,-	

			Jumlah WL LHKPN yang terverifikasi lengkap dan tepat waktu						Jumlah SKP yang terkumpul dan di evaluasi Jumlah WL LHKPN yang terverifikasi lengkap dan tepat waktu				
38	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tnh Grgt	Jumlah Peraturan Bupati dan Petunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN yang dievaluasi	2	Dok	86.308.500,-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tnh Grgt	Jumlah Peraturan Bupati dan Petunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN yang dievaluasi	2	Dok	86.308.500,-	
39	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Tnh Grgt	Jumah SK berkala PNS yang terselesaikan tepat waktu Jumlah Peraturan Kepela Daerah ttg Standarisasi Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja yang ditetapkan	18 1	Org dok	100.286.000,-	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Tnh Grgt	JumahSKberkala PNS yang terselesaikan tepat waktu Jumlah Peraturan Kepela Daerah ttg StandarisasiTambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja yang ditetapkan	18 1	Org dok	100.286.000,-	
40	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Tnh Grgt	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan Satya Lemcana Karya Satya			115.732.000,-	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Tnh Grgt	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan Satya Lemcana Karya Satya			115.732.000,-	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Tnh Grgt	Jumlah kasus-kasus pelanggaran yang diselesaikan	7	kasus	155.696.500,-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Tnh Grgt	Jumlah kasus-kasus pelanggaran yang diselesaikan	7	kasus	155.696.500,-	
41	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**4.952.078.750,-**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**4.817.937.031,-**	
42	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**4.952.078.750,-**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**4.817.937.031,-**	

43	**Sertfikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**					**4.952.078.750,-**	**Sertfikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**					**4.817.937.031,-**	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabaran Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Tnh Grgt	Juml CPNS yang mendapatkan pendidikan LATSAR Jumlah Pejabat yang mendapatlan pendidikan PKP, PKA dan PKN	140 48	Org org	4.952..078.750,-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabaran Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Tnh Grgt	Juml CPNS yang mendapatkan pendidikan LATSAR Jumlah Pejabat yang mendapatlan pendidikan PKP, PKA dan PKN	140 48	Org org	4.817.937.031,-	
	JUMLAH SELURUHYA					**17.092.774.031,-**						**17.140.632.312,-**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, tidak terdapat masukan dari masyarakat terkait masalah kepegawaian. Dikarenakan Musrenbang untuk Tahun 2022 telah membuat Kelompok Kerja sesuai sector yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga bagian Pemerintahan dan fungs Kepegawaian tidak termasuk di dalamnya. Berikut Tabel penjelasan

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nihil	-	Nihil	Nihil	-

BAB III.
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022, pada dasarnya telah dilakukaan penelaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser.

Di sisi lain, dalam penyusunan perencanaan kerja ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser telah melakukan penelaahan, penyelarasan dan sinergisasi program dan kegiatan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Negara serta RPJMD Kabupaten Paser. Mengingat keterbatasan dana yang dimiliki untuk melakukan penyelarasan secara langsung maka BKD Kabupaten Paser hanya melakukan penyelarasan program dan indikator kinerja ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Negara. Hasil penyelarasan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara program yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran atau pagu indikatif yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan hasil penelahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	**Nasional**		
1	Program Kebijakan perencanaan SDM aparatur	Kementrian PAN dan RB	
2	Program Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawaian	Badan Kepegawaian Negara	
3	Program Peningkatan kualitas pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Lembaga Administrasi Negara	
4	Program Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I,II,III dan IV	Lembaga Administrasi Negara	
B	**Provinsi (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimanatan Timur)**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Timur**	
1	Program peningkatan disiplin aparatur		
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
3	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
5	Program pendidikan kedinasan		
6	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		

2.4. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Perumusan tujuan dan sasaran perencanaan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan Rancangan awal Rencana Strategis 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.2
Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan sesuai dengn kompetensinya	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
			Persentase Aparatur Sipil Negara yang Berkinerja Baik
			Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara sesuai Kebutuhan
			Persentase Data Kepegawaian yang Terbarukan
2.	Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang Prima	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKPSDM

1. **Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN**

   Indikator :

   Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, teridid atas Kegiatan/Sub Kegiatan berikut :

   - Kegiatan Mutasi dan promosi ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 990.816.210,-
   - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.956.301.422,-
   - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 658.071.760,-
   - Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional teknis, dengan anggaran sebesar Rp. 7.592.774.031,-
   - Kegiatan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.339.347.380,-

2. **Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**

   Indikator :

   Nilai SAKIP BKPSDM

   - Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 259.136.370,-
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 5.399.656.100,-
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.700,-
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 286.585.081,-

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 60.033.282,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.542.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 125.196.862,-

3.3. Program dan Kegiatan

Pada umumnya program dan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 merupakan program dan kegiatan rutinitas yang selalu dilaksanakan dari tahun ke tahun yang telah diselaraskan dengan program dan/atau kegiatan BKD Provinsi Kaltim dan Badan Kepegawaian Negara.

Pada Tahun 2022 progam yang direncanakan terdiri atas 3 (tiga) program yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan, dengan total anggaran dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 15.894.623.498,00 (Lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Jumlah anggaran ini diperkirakan akan dapat kurang dari pagu RKPD, hal tersebut disebabkan karena kebutuhan akan pembiayaan diklat khususnya diklat kepemimpinan akan sedikit berkurangnya karena sudah hampir terisinya seluruh jabatan hasil dari pemetaan atas penyederhanaan birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi, serta pelaksanaan pengadaan pegawai hanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga

diperkirakan juga akan menghemat biaya pendidikan dasar yang biasa harus diperoleh oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Deskripsi mengenai rumusan rencana program, kegiatan serta pagu indikatif yang dibutuhkan (setelah disesuaikan dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan) sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen LIstrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan meubel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

b. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Data Kepegawaian
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- Evaluasi Pemberhentian ASN
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan mutasi ASN
- Pengelolaan promosi ASN
- Pengelolaan kenaikan pangkat

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Assesment Center
- Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
- Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN
- Pembinaan jabatan fungsional ASN
- Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur
- Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
- Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
- Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
- Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai

- Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansi, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Paser, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada tahun 2022 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2022. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Paser

Kode						Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (putcome) dan Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif
5	03					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMEIRNTAH**									
5	03	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Out Come :	**Tersedianya sumber daya penunjang pelaksanaan program dan kegiatan**	Tanah Grogot		**6.141.154.041,-**	APBD			**6.755.269.445,10**
5	03	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Outcome :	Nilai SAKIP PD			**209.135.791,-**	APBD			**230.049.370,-**
5	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Out put :	Jumlah dokumen perancanaan daerah (Rensra, Renja, Ranwal PD) yang tersusun	Tanah Grogot	6 dok	75.010.400,-	APBD			82.511.440,-
5	03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Out put :	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Rencana Aksi, IKU dan IKI, TEPRA, SIRUP, LPPD, Ev.Renstra, Ev. RPJMD) yang tersusun	Tanah Grogot	10 dok	134.125.391,-	APBD			147.537.930,-
5	03	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Outcome :**	**Tersusunnya dokumen keuangan PD**	**Tanah Grogot**		**5.399.656.210,-**	**APBD**			**5.939.621.831,-**
5	03	01	2	02	07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Out put :	Daftar gaji dan tunjangan ASN	Tanah Grogot	12 bln	5.190.957.130,-	APBD			5.710.052.843,-
5	03	01	2	02	07	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Out put :	Jumlah dokumen keuangan PD yang tersusun (Lap. Rekosiliasi keuangan, prognosis, CaLK) Jumlah dokumen keuangan PD yang tersusun (SPP-SPM)	Tanah Grogot	15 dok 250 dok	208.699.080,-	APBD			229.568.988,-
5	03	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian PD**	Outcome :	Terkeolanya administrasi kepegawaian PD	Tanah Grogot		**50.000.700,-**	APBD			**55.000.770,-**
5	03	01	2	05		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Out put :	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	Tanah Grogot	47 prg PD	50.000.700,-	APBD			55.000.770,-
5	03	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Outcome :	Terselenggaranya administrasi umum PD	Tanah Grogot		**295.585.550,-**	APBD			**325.144.105,-**

5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Out put :	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	Tanah Grogot	12 bln	1.452.440,-	APBD			1.597.684,-
5	03	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Out put :	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebtuuhan	Tanah Grogot	2 unit	16.984.000,-	APBD			18.682.400,-
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Out put :	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Tanah Grogot	12 bln	40.001.610,-	APBD			44.001.771,-
5	03	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Out put :	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Tanah Grogot	12 bln	10.011.100,-	APBD			11.012.210,-
5	03	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Out put :	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Tanah Grogot	720 eks	4.593.600,-	APBD			5.052.960,-
5	03	01	2	06	09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Out put :	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tanah Grogot	12 bln	155.030.800,-	APBD			170.533.880,-
5	03	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Out put :	Jumlah jenis arsip dinamis yang terkelola secara efektif dan efisien	Tanah Grogot	11 jns	67.512.000,-	APBD			74.263.200,-
5	03	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Outco me :	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tanah Grogot		**60.033.300,-**	APBD			66.036.630,-
5	03	01	2	07	05	Pengadaan Meubel	Out put :	Jumlah meubelair yang diadakan	Tanah Grogot	3 unit	8.838.500,-	APBD			9.722.350,-
5	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Out put :	Tersedianyan peralatan dan peralatan mesin kantor lainnya sesuai kebutuhan	Tanah Grogot	3 unit	51.194.800,-	APBD			56.314.280,-
5	03	01	2	08		**Penyediaan Jasa Pneunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Outco me :	**Penyediaan Jasa Pneunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tanah Grogot	**Penyediaa n Jasa Pneunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**1.545.500,-**	APBD			1.700.050,-
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Out put :	Jumlah jasa surat menyurat yang dikirim	Tanah Grogot	10 dok	456.500,-	APBD			502.150,-
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik	Out put :	Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKPSDM yang terbayarkan	Tanah Grogot	12 bln	1.089.000,-	APBD			1.197.900,-
5	03	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Outco me :	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pneunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tanah Grogot		**125.196.990,-**	APBD			137.716.689,-

						Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Out put :	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dna terbayarnya pajak kendaraan	Tanah Grogot	2 unit	44.491.000,-	APBD			48.940.100,-
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peraltan dan Meisn lainnya	Out put :	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Tanah Grogot	12 bln	17.572.000,-	APBD			19.329.200,-
5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Out put :	Terpeliharanya gedung kantor	Tanah Grogot	12 unit	58.863.990,-	APBD			64.750.389,-
5	03	01	2	09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Out put :	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Tanah Grogot	12 unit	4.270.000,-	APBD			4.697.000,-
5	03	01	2	01		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Outcome :	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tanah Grogot		**5.999.541.240**	APBD			6.599.495.364,-
5	03	01	2	01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Outcome :	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Tanah Grogot		**1.481.375.790,-**	APBD			1.629.513.369,-
5	03	01	2	01	03	Kooridnasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Out put :	Jumlah administrasi pengangkatan CNS danPPPK yang terselesaikan Jumlah CPNS yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS Jumlah peserta yabg lulus seleksi CPNS dan PPPK	Tanah Grogot	304 org 154 154 150	617.579.530,-	APBD			679.337.483,-
5	03	01	2	01	06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Out put :	Jumlah SK pension yang diterbitkan tepat waktu	Tanah Grogot	160 SK	69.020.000,-	APBD			75.922.000,-
5	03	01	2	01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Out put :	Jumlah ASN yang mengikuti pembekalan	Tanah Grogot	53 org	84.292.730,-	APBD			92.722.003,-
5	03	01	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Out put :	Jumlah fasilitasi kegiatan KORPRI yang dapat terlaksana	Tanah Grogot	4 keg	161.343.670,-	APBD			177.478.037,-
5	03	01	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Out put :	Aplikasi kepegawaian yang ditingkatkan, dikelola dan dipelihara	Tanah Grogot	1 apk	221.936.000,-	APBD			244.129.600,-
5	03	01	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Out put :	Jumlah KARPEG/KARIS?KARSU?TASPEN yang telah diterbitkan Jumlah Kartu Tanda Penganl ASN yang diterbitkan	Tanah Grogot	100 dok 800 kartu 100 %	252.163.660,-	APBD			277.380.026,-

								Persentase data kepegawaian yang diperbaharui							
5	03	01	2	01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Out put :	Persnetase rekonsiliasi Data Kepegawaian di lingk.Pemkab Paser	Tanah Grogot	100 %	75.040.200,-	APBD			82.544.220,-
5	03	01	2	02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Outco me :	Terselenggaranya mutase dan promosi ASN	Tanah Grogot		**1.124.931.550,-**	APBD			1.237.424.705,-
5	03	01	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Out put :	Jumlah rekomendasi dan SK dari BKPSDM Paser, BKD Provinsi, BKN dan Mendagri	Tanah Grogot	400 dok	130.754.750,-	APBD			143.830.225,-
5	03	01	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Out put :	Jumlah SK Kenaikan Oangkat yang dievaluasi Jumlah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu	Tanah Grogot	1 dok 800 SK	163.574.000,-	APBD			179.931.400,-
5	03	01	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Out put :	Terseleksinya jumlah ASN yang dapat mengikuti seleksi calon JPT Terseleksinya jumlah ASN yang mnegikuti lelang jabatan Terselenggaranya rapat baperjakat	Tanah Grogot	24 org 24 org 6 rapat	830.602.800,-	APBD			913.663.080,-
5	03	01	2	03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Outco me :	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Tanah Grogot		**2.595.161.400,-**	APBD			2.854.677.540,-
5	03	01	2	03	02	Pengelolaan Assesment Center	Out put :	Meningkatnya mutu SDM Tim teknis IT As. Center Terkelolanya sarana dan prasarana As.center	Tanah Grogot	5 org 12 bln	926.164.000,-	APBD			1.018.780.400,-
5	03	01	2	03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	Out put :	Jumlah pegawai dapat difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan diklat Jumlah pegawai yang difasilitasi mendapatkan Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Jumlah pegawai yang difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Dinas Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan workshop/sosialisasi/pelatihan	Tanah Grogot	40 org 33 org 171 org 100 0	975.339.800,-	APBD			1.072.873.780,-
5	03	01	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Out put :	Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar atau Ijin belajar	Tanah Grogot	10 org	515.812.200,-	APBD			567.393.420,-
5	03	01	2	03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Out put :	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan tepat waktu	Tanah Grogot	120 SK	114.424.000,-	APBD			125.866.400,-

5	03	01	2	03	13	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Out put :	Jumlah rekomendasi peninjauan masa kerja	Tanah Grogot	10 SK	63.421.000,-	APBD			69.763.100,-
5	03	01	2	04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Outcome :	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Tanah Grogot		**798.072.500,-**	APBD			877.879.750,-
5	03	01	2	04	01	Penyusunan Kebijajan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Out put :	Jumlah Peraturan Bupati dna Petunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN	Tanah Grogot	2 dok	72.056.000,-	APBD			79.261.600,-
5	03	01	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Out put :	JUmlah Perbup danPetunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN Jumlah SKP yang terkumpul dan di evaluasi Jumlah WL LHKPN yang terverifikasi lengkap dan tepat waktu	Tanah Grogot	2 dok 4.634 SKP 224 wajib lapor	267.993.500,-	APBD			294.792.850,-
5	03	01	2	04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Out put :	Jumlah Peraturan Bupati dan Petunjuk Tekhnis Sistem Manajemen Kinerja ASN yang dievaluasi	Tanah Grogot	2 dok	86.308.500,-	APBD			94.939.350,-
5	03	01	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Out put :	JumahSKberkala PNS yang terselesaikan tepat waktu Jumlah Peraturan Kepela Daerah ttg StandarisasiTambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja yang ditetapkan	Tanah Grogot	18 org 1 dok	100.286.000,-	APBD			110.314.600,-
5	03	01	2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Out put :	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan Satya Lemcana Karya Satya	Tanah Grogot		115.732.000,-	APBD			127.305.200,-
5	03	01	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Out put :	Jumlah kasus-kasus pelanggaran yang diselesaikan	Tanah Grogot	7 kasus	155.696.500,-	APBD			171.266.150,-
5	04	02				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	Outcome :	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	Tanah Grogot		**4.952.078.750,-**	APBD			**5.447.286.625,-**
5	04	02				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Outcome :	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Tanah Grogot		**4.952.078.750,-**	APBD			**5.447.286.625,-**

5	04	02	2	02		**Sertfikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Outcome :	**Sertfikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Tanah Grogot		**4.952.078.750,-**	APBD			**5.447.286.625,-**
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabaran Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Out put :	Juml CPNS yang mendapatkan pendidikan LATSAR Jumlah Pejabat yang mendapatlan pendidikan PKP, PKA dan PKN	Tanah Grogot	140 org 48 org	4.952..078.750,-	APBD	180 org 60 orang		5.447.286.625,-

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi RSUD. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan tahun 2022 yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan sebagai berikut:

Sasaran	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3
Meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN	**Program Kepegawaian Daerah**	**7.891.413.080,-**
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	**2.939.334.330,-**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	515.812.200,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	975.339.800,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	830.602.800,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi PNS dan PPPK	617.579.530,-
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**4.952.078.750,-**
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.952.0618.750,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dna Prajabatan	4.952.078.750,-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	**Program Kepegawaian Daerah**	**319.270.500,-**
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.585.550,-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.033.300,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.545.500,-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.196.990,-
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentiaan dan Informasi Kepegawaian ASN	69.020.000,-

	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	155.696.500,-
	Kegiatan mutasi dan promosi ASN	163.574.000,-
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	**Program Kepegawaian Daerah**	**473.099.660,-**
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	**473.099.660,-**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	221.936.000,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	251.163.660,-
	Jumlah	**13.635.861.990,-**

BAB V. PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 merupakan sebuah dokumen rancangan perencanaan kerja yang disusun berdasarkan analisisis kebutuhan dan berorientasi pada pencapaian hasil serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang diwujudkan melalui program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, maka dokumen perencanaan kerja ini disusun dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai, maka pada Tahun 2021 program dan kegiatan yang disusun terdiri atas 9 (sembilan) program yang kemudian dijabarkan kedalam 59 (Lima Puluh Sembilan) kegiatan. Mengingat perubahan nomenklatur dan tergabungnya KORPRI dalam BKPSDM maka penyesuaian dengan Pagu Indikatif ini harus mengurangi target yang direncanakan mengingat keterbatasan dana. Maka diharapkan pada periode 2021 berlanjut dapat diberikan penambahan agar target yang sudah direncanakan dan tertuang dalam Renstra dan RPJMD dapat tercapai.

Di dalam RKPD Kabupaten Paser kegiatan-kegiatan yang semestinya ada dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Program Pendidikan Kedinasan,
2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4. Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Namun pada pelaksanaannya Program Berikut:

1. Pendidikan Kedinasan
2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Tidak dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merujuk pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kebijakan BAPPEDA Kabupaten Paser.

Selain mengacu dan memperhatikan prioritas serta sasaran pembangunan pemerintah daerah, dalam perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser telah berupaya agar program dan kegiatan yang direncanakan selalu selaras dan sinergis dengan program dan kebijakan daerah maupun nasional. Untuk itu, sebelum melakukan finalisasi terhadap rencana program dan kegiatan Tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser telah melakukan penyelarasan dan sinergisasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Negara.

Demikian dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 ini disusun. Kami menyadari bahwa keterbatasan kemampuan APBD merupakan kendala yang selalu menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak termasuk dukungan dana APBD sangat kami harapkan, sehingga program dan kegiatan yang kami rencanakan dapat terlaksana serta apa yang menjadi visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kabupaten Paser yang merupakan tindakan nyata untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dapat tercapai.